

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Demikian Pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah Desa Kuala terlihat sudah berjalan, tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan sehingga tidak terbentuknya keterbukaan aksesin formasi bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Kuala. Sehingga kemampuan aparat Desa Kuala tidak mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, tidak terlaksananya program berdasarkan keinginan masyarakat, minimnya dana yang tersedia.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersifat transparan, aksesin formasi antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya bersifat terbuka. Namun dari sisi perencanaan partisipasi masyarakat masih

kurang, ketidak sesuaian persis berdasarkan aturan dengan kebutuhan yang ada dalam hal ini bidang pembangunan desa, mark up anggaran pengalokasian dana pada post lain untuk membiayai kegiatan operasional,

3. Pada tahap pertanggungjawaban pelaporan dana desa, pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam hal ini bendahara Desa Kuala belum mam pumengellolah keuangan. Hal ini ditandai dengan a. kurangnya SDM aparat desa dalam pengelolaan keuangan.

Adapun alur pengelolaan alokasi dana desa adalah:

1. Desa

- Lap. Real APB Desa SEMESTERAN
- LPJ Real APB Desa TAHUNAN
- Laporan KMD

4. Selanjutnya Kemampuan aparat Desa Kuala dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pengawasan alokasi dana desa di desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat pemerintah Desa Kuala bahwa kurangnya pengawasan kepala desa yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa, juga kurangnya partisipasi kepala desa dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja aparat Desa Kuala dalam

membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala masih belum nampak bahkan cenderung masyarakat tidak peduli dengan adanya program tersebut. Hal ini terjadi karena kurang pemahamnya masyarakat akan adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari aparat Desa Kuala.

## **5.2 Saran**

Ada beberapa saran pokok dari peneliti untuk lebih meningkatkan Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Berdasarkan Aparat Desa Kuala hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa bimbingan teknis administrasi untuk menunjang kemampuan teknis (mengoperasikan komputer) agar mempercepat pembuatan persyaratan pencairan alokasi dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk

peraturan undang-undang yang mendukung aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pengawasan dan pengendalian.

3. Demikian Aparat Desa Kuala hendaknya lebih meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia maupun keterampilannya dimasing-masing bidang dalam hal pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat. Dan aparat pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat desa karena masyarakat desa juga mempunyai hak untuk mengetahui anggaran alokasi dana desa tersebut.
4. Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan dalam melakukan kegiatan atau pelatihan keterampilan bagi aparat Desa Kuala dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan aparat Desa Kuala dalam berbagai aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi tugas dan fungsinya, dan adanya kesadaran/kemauan dari aparat Desa Kuala untuk ikut serta dalam peningkatan kompetensi dalam hal mempertanggungjawabkan tugasnya. Serta semakin menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggung, Greogius. 2006. *SPP Menginstalasi Perangkat Jaringan Komputer*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Agus, Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Bactiar. 2015. *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta . Kurnia Alam Semesta.
- Ginanjari. (2005), *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo
- Halim Abdul, 2007 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Eidisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Lestari. 2016. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)*. Skripsi.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Kountut, R. 2003. *Metode Penelitian Untuk penulisan Skripsi dan tesis*, Jakarta: PPM.
- Landis H. (2012), *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*, raja grafindo.
- Margaretha, dkk (2002) *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. (Jakarta: Bina Media Informasi).
- Mardiasmo, 2002 *Akuntansi Sektor Publik, Eidisi II* Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Desa*.30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014* Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 35 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta.

Rahardjo.(1999).Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahmi, dkk. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 7, Hal. 1099-1104.

Riyani. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi.

Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Yayasan Obor Mas:Jakarta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, M Kualitatif*. R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biro Maru Kabupaten Sigi*. E-jurnal katalogis. Vol 3 No. 2. ISSN:2302-2019.

Sumpeno, W. 2011.*Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Suryono, bambang. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5.

Thomas.2013,"*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*",eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.

Thoha, Miftah, (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Tjokroamindjojo, Bintoro. 2000. *Good Nevernance: Pembangunan Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat Dua*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Prisada.

Widjaja, HAW. (2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada.